

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN BELAT
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan
pada Universitas Maritim Raja Ali Haji



Oleh

MUHAMAD ASRIZAL

NIM : 130565201088

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2017

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN BELAT
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015.**

MUHAMAD ASRIZAL

ABSTRAK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu fokus Pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terkait dengan masih terbatasnya akses di dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan. Tidak dalam hal itu saja masyarakat juga belum bisa merubah pola pikir mereka yang terus menerus mengharap bantuan dari pemerintah dan akhirnya masyarakat kurang mandiri. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dengan pertimbangan penulis ingin melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun metode yang digunakan deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian. Sehingga peneliti turun lapangan langsung dan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan belum terlaksana dengan baik salah satu dapat dilihat tidak ada kurangnya angka kemiskinan dan pendidikan dimasyarakat kesimpulan ini di dasari atas hasil observasi dan keterangan sejumlah informan yang menjadi objek penelitian.

Kata kunci : Evaluasi, pemberdayaan, program keluarga harapan.

ABSTRAK

To improve the Quality Of Human Resources (SDM) is one of the focus of the government to reduce the number of poverty in Indonesia. This is caused because it is still low access in the field of health and education. Not in it just the public also can not change the mindset their continuously hope for the help of the government and finally people less independent. Researcher is done in the village Sungai Asam district Belat district Karimun with the consideration writer want to do evaluation of the implementation of the empowerment of the family hope (PKH).

As for the methods used is deskriptif kualitatif technique of collecting data carried out through the interview with a number of informant considered relevant with research. So that the researchers down the pitch directly and see the phenomenon happened in the community the family hope (PKH) that had been walking not happen with a better one can be seen no lack of a number of poverty and education in the community the conclusion is based on top of the observations and the description of a number of informant become the object research.

Key words : Evaluation, the empowerment of, the family of hope.

A. PENDAHULUAN

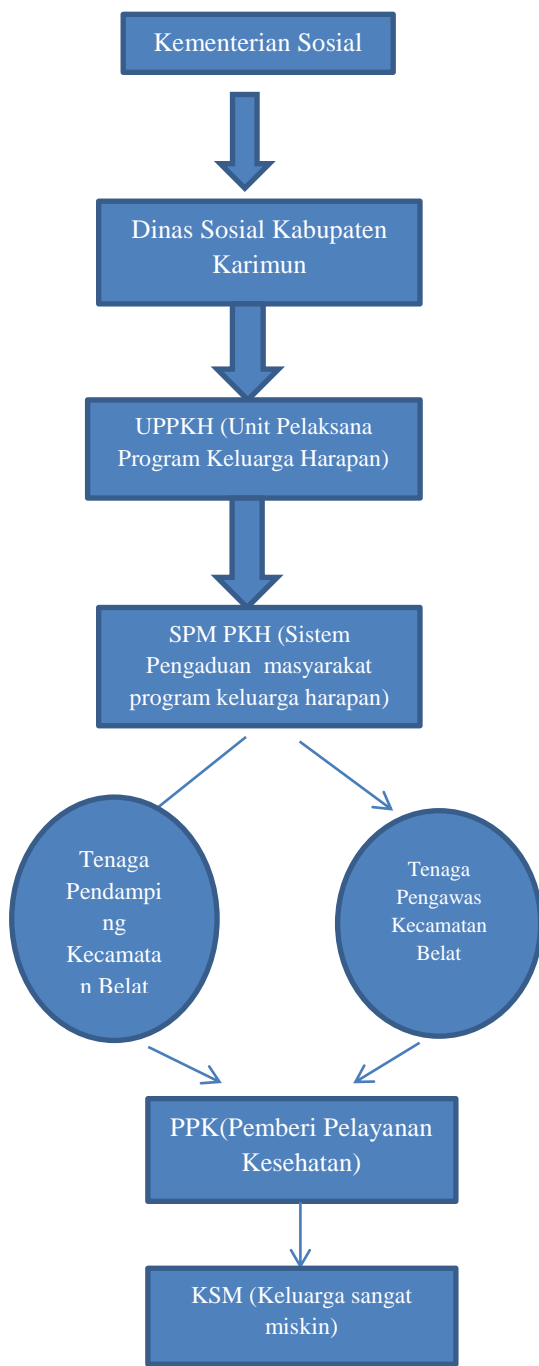
Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh sebagian Negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di Negara - Negara kawasan Afrika, melainkan juga dialami di Negara - Negara kawasan asia seperti di Indonesia. Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu Negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kemiskinan adalah standart tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dimasyarakat sekitarnya. Untuk meminimalisirkan permasalahan kesejahteraan, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari kehari maka pemerintah Indonesia melalui kementrian sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) dijalan kan sebagai pelaksanaan dari UU no. 40

tahun 2004 tentang jaminan sosial. UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Inpres no. 3 tahun 2010 tentang Program pembangunan yang berkeadilan. Perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. (*Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan tahun 2013*). Program Keluarga Harapan berfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktifitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Tujuan utama dari

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut senada dengan upaya percepatan pencapaian target *Mllennium Development Goals* (MDG). Dimana secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak – anak RTSM, meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan kesehatan RTSM. (*Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan tahun 2013*). Berikut adalah mekanisme bantuan Program Keluarga Harapan tersebut

Mekanisme Bantuan PKH di Desa Sungai Asam Tahun 2015



Berdasarkan tabel diatas khususnya di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten karimun memang banyak masyarakat yang miskin (KSM), dan layak untuk menerima bantuan tersebut. Hingga saat ini berdasar kan data di Desa sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun angka kemiskinan berkisar diangka 108 perkartu keluarga (KK), dan angka tersebut sangatlah besar bagi Desa Sungai Asam sehingga berdampak lah pada pendidikan anak – anak di Desa Sungai Asam. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa tersebut setidaknya bisa membantu masyarakat walaupun bantuan tersebut tidak semua mendapatkan akan tetapi bantuan itu bersifat bergiliran,

Sehingga saat ini bantuan Program Keluarga Harapan di dapat hanya 45 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari ibu yang lagi hamil 32 orang, yang tidak hamil 10 orang (miskin), dan mempunyai anak yang menempuh pendidikan dasar (SD) 27 orang, sekolah menengah pertama (SMP) 8 orang, dan sekolah menengah atas (SMA) 12 orang. (*Sumber data desa tahun 2015*)

Sehingga saat ini dengan salah satu program pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk menurunkan angka kemiskinan pada masyarakat serta memperbaiki kesehatan masyarakat yang miskin (KSM), dan meningkatkan pendidikan anak lebih baik lagi dengan bantuan langsung tunai Rp. 1.200.000 satu tahun empat

kali yang diambil oleh anak tersebut dengan harapan supaya memperbaiki pendidikan penerus bangsa yang lebih baik lagi. Akan tetapi, bantuan itu selalu disalah gunakan oleh masyarakat (orang tua anak tersebut) sehingga bantuan tersebut bukan hanya digunakan untuk kebutuhan anak itu saja, melainkan kebutuhan keluarga itu sendiri sehingga bantuan tersebut tidak bisa dirasakan anak – anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Fenomena yang terjadi dimasyarakat saat ini dengan menerima bantuan tersebut bukan lah membuat mereka memberikan pendidikan yang layak untuk anak mereka melainkan mereka mengambil bantuan tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari - hari mereka. Dari permasalahan yang diurai kan dilatarbelakang diatas, maka peneliti

tertarik untuk meneliti dan menganalisis kasus tersebut dengan judul “EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELUARGA HARAPAN (PKH) DI MASYARAKAT PESISIR DIDESA SUNGAI ASAM KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pendidikan anak-anak di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun tahun 2015 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap

pendidikan anak – anak di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

2. Untuk mengetahui dampak dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut di masyarakat pesisir Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis dapat menambah referensi tentang kehidupan dan kultur masyarakat pesisir khususnya di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, Serta dapat membuat masyarakat dan mahasiswa dapat tahu tentang perbedaan saat perkuliahan dan pada kondisi prakteknya yang berbeda pada kenyataannya. Serta membuat masyarakat lebih cerdas dan mengetahui apa yang pantas mereka terima dari birokrasi maupun pelayanan serta bantuan yang pantas untuk masyarakat di Desa Sungai

Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

METODE PENELITIAN

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif secara induktif. Artinya, mula – mula data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan kedalam tema – tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya untuk kemudian dikaitkan dengan konseptualisasi proses evaluasi. Untuk informan dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai 5 elemen instansi yaitu terdiri dari Dinas Sosial, Tenaga Pendamping (PKH), Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Menerima Bantuan (PKH).

Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Adapun fungsi dari konsep operasional adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena atau gejala – gejala yang diamati dengan jelas, logika, atau penalaran yang digunakan oleh peneliti untuk menerangkan fenomena yang diteliti atau dikaji hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan – kegiatan yang dilakukan. Dalam konsep operasional ini peneliti menggunakan teori Dunn (2003 : 610)

1. Efektivitas, Berkenaan dengan apakah Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mencapai hasil yang diinginkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator :
 - a. Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat
 - b. Merubah kehidupan sosial masyarakat
2. Efisiensi : Berkenaan dengan jumlah bantuan yang diperlukan agar Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari indikator : Jumlah Bantuan Tunai Lansung (BLT) yang diberikan kepada masyarakat.
3. Kecukupan : Berkenaan dengan seberapa jauh Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari indikator : Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tepat sasaran.
4. Perataan : Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari indikator : Jumlah bantuan yang sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan sebelumnya oleh instansi terkait.
5. Responsivitas : Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan

kebutuhan, Preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Kepuasan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dapat dilihat dari indikator : Adanya kepuasan masyarakat terhadap bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Asam yang dijalankan.

6. Ketepatan : Suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

- a. Adanya penyesuaian biaya yang dianggarkan.
- b. Adanya penyesuaian laporan pertanggungjawaban dengan pelaksanaan.

Hasil Pembahasan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat Desa Sungai Asam terutama dalam hal pelayanan dan tujuan dari bantuan tersebut yang untuk memperbaiki gizi ibu hamil dan meningkatkan pendidikan anak – anak di masyarakat, maka dari itu guna menganalisa satu persatu dari indikator yang ada,

Efektivitas Program Keluarga harapan (PKH).

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal ini tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas, dimana makin besar presentasi target yang dicapai, maka makin tinggi efektifitasnya.

Menurut analisis penulis dilapangan bahwa masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum memahami program dimaksud disebabkan oleh masyarakat yang kurang pengetahuan sehingga kurang mengerti saat sosialisasi cara mengambil uang (BLT) ataupun visi misi dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dalam pengelolaan bantuan tersebut masyarakat juga masih bingung dengan pengambilan bantuan dimana masyarakat merasa kesulitan

transportasi dan tidak terbiasa dalam menggunakan pos, sehingga masyarakat pada awal menerima bantuan agak kebingungan dan ada yang menunggu hampir seharian

Kecukupan bagi bantuan Program Keluarga Harapan.

Kecukupan (*aquacy*), berkenaan dengan seberapa jauh tingkat pencapaian yang diinginkan untuk memecah masalah bagi Program Keluarga Harapan. Serta mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurut analisis penulis saat turun lapangan dalam hal bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat tampak dari hasil wawancara masyarakat merasa tidak berkecukupan yang dimana bantuan belum bisa dioptimalkan oleh mereka karena nominal yang sangat kecil, tak

jarang dari mereka yang harus libur bekerja untuk mengambil bantuan tersebut sehingga tak jarang dari masyarakat yang tidak hadir dalam pengawasan yang kurang jelas.

Efisiensi masyarakat dalam tujuan

Program Keluarga Harapan

Dalam hal ini efisiensi dalam suatu program sangatlah perlu untuk mengukur evaluasi dalam suatu program yang dilakukan oleh suatu kebijakan yang menghasilkan suatu program yang akan dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat

Dalam hal ini apakah Program Keluarga Harapan tersebut berjalan semestinya dan bagaimana dengan sasaran tujuan dari program tersebut sudah efisien yang diperlukan untuk hasil dari tujuan tersebut.

mengambil bantuan dikarenakan pekerjaan maupun transportasi. Serta kurangnya perhatian pemerintah dalam hal transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan bahwa dampak seharusnya dari kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penerima bantuan dapat dilihat dari meningkatnya pendidikan anak-anak dan terjaganya gizi ibu hamil, sehingga sebelumnya masyarakat yang tidak menyekolahkan anak mereka kedepan, dapat memberi pendidikan yang seharusnya dan yang dulu masyarakat khususnya ibu hamil jarang mendapatkan gizi serta perawatan yang layak sekarang dengan adanya

program ini diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang baik lagi, sehingga masyarakat akan terhindar dengan kekurangan Pendidikan serta Kesehatan.

Pemerataan atau kesamaan (*equity*) terhadap Program Keluarga Harapan

Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat atau alokasi Bantuan Langsung Tunai merata kepada masyarakat sasaran. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaat merata.

Pemerataan berhubungan dengan keadilan yang didapatkan oleh masyarakat sasaran dalam mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang

dikelola oleh Kementerian Dinas Sosial di pemerataan juga menyangkut kepada tersosialisasikannya Program Keluarga Harapan (PKH) kepada semua pihak yang terkait serta lancarnya perguliran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat lainnya.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai pemerataan dalam alokasi Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat sasaran yang dilaksanakan oleh Program Keluarga Harapan (PKH), dapat ditarik kesimpulan kalau alokasinya tidak merata. Masih banyak masyarakat Desa Sungai Asam yang miskin belum berkesempatan untuk mendapatkan bantuan ini. Malahan masyarakat yang benar – benar miskin yang menjadi target utama yang paling banyak tidak

mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

Hal yang dapat ditarik dari hasil wawancara diatas adalah, penyaluran bantuan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat tidak efektif, karena terfokuskan kepada pemberian Bantuan Lansung Tunai sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui sumber daya Pendidikan dan Kesehatan tidak ada. Hal ini juga yang membuat masyarakat yang anak - anaknya tidak berpendidikan dan ibu hamil dan perbaikan gizi tetap dengan taraf hidup yang sama tanpa mengalami perubahan.

Responsivitas Terhadap Program Keluarga Harapan

Responsivitas adalah tanggapan dari masyarakat

pemanfaatan Program Keluarga Harapan berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,

Hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima bantuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka belum mengerti dan memahami apa tujuan dari bantuan tak jarang dari mereka belum menemukan jati diri mereka dikarenakan mereka hanya berusaha dengan untuk mendapatkan uang sekadar untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu saja tanpa memikirkan hasil dan tujuan Program Keluarga Harapan tersebut.

Ketepatan (*appropriateness*) Program Keluarga Harapan.

Ketepatan bantuan Program Keluarga Harapan yang benar – benar

berguna dan bernilai serta tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan, sehingga dengan tercapainya program yang ditetapkan yang meliputi bantuan Program Keluarga Harapan, meningkatkan angka kesehatan masyarakat yang semakin membaik, meningkatkan pendidikan anak – anak semakin membaik, memperbaiki perekonomian masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, kekurangan gizi dan kekurangan pendidikan bagi masyarakat yang memanfaatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan observasi di lokasi Program Keluarga Harapan banyak sekali aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan dari bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan

tidak berkembangnya masyarakat akibat pemanfaatan bantuan program yang kurang optimal sehingga tak jarang dari masyarakat hanya memikirkan kehidupan mereka pada saat itu saja. Seharusnya pola pikir mereka yang harus diubah supaya mereka bisa mandiri dan jauh dari kata kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini ditarik kesimpulan bahwa bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pelaksana Kementerian Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan sejumlah

indikator penelitian yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari belumnya tercapai visi dan misi dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Keberadaan Program Keluarga Harapan yang seharusnya dapat memberikan gizi dan pendidikan anak – anak semakin membaik ternyata hanya menjadi suatu bantuan yang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga.
2. Efisiensi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan dengan baik,

hal ini dapat dilihat dari seberapa banyak usaha masyarakat dalam memanfaatkan bantuan tersebut. Kebanyakan masyarakat banyak melakukan penyalahgunaan dalam hal bantuan tersebut sehingga bantuan ini tidak efisien apalagi dalam bantuan ini bersifat Bantuan Langsung Tunai (BLT).

3. Kecukupan dalam hal ini bantuan yang diberikan pemerintah belum berceukupan yang mana Dinas Sosial tidak menyediakan alat transportasi atau pun bantuan sedikit biaya untuk para Pos atau masyarakat dalam hal pengambilan bantuan, sehingga tak jarang masyarakat mengeluarkan uang

pribadi. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan dalam hal kecukupan belum berjalan dengan baik.

4. Kesamaan atau pemerataan secara keseluruhan tidak mencerminkan kualitas Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tidak meratanya alokasi Batuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan yang benar – benar miskin belum dapat ataupun didahulukan dalam Pelaksanaan Program tersebut.
5. Responsivitas yang berhubungan dengan penilaian kepatuhan pengguna atau pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya sanksi yang benar – benar tegas bagi pemanfaatan bantuan yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan tidak berjalan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sebenarnya sudah ada pengawas tetapi belum memahami karakter dari masyarakat serta pola masyarakatnya, sehingga yang harus diubah adalah pola pikir masyarakatnya.

6. Ketepatan berhubungan dengan menilai apakah kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan oleh

Dinas Sosial kepada masyarakat yang ada benar – benar berguna dan bernilai, sehingga tercapainya tujuan program yang meliputi gizi dan pendidikan anak – anak. Namun hal ini tidak menjadi dan menjamin gizi dan pendidikan anak – anak membaik dan pemanfaatan bantuan tersebut belum tercapai.

SARAN

Berdasarkan penelitian aktifitas dilapangan dan melihat proses bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) saran saya sebagai penulis adalah masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama dalam hal ini pola pikir dari masyarakat. Seharusnya dulu

diubah dalam hal program bantuan karena disini apabila cuma pemerintah sahaja yang ingin melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat tetapi masyarakatnya tidak akan tercapai suatu program tersebut.

Begitu halnya juga pada pemerintah sebelum memberikan program atau menjalankan suatu kebijakan yang bersifat bantuan seharusnya pemerintah melakukan terlebih dahulu observasi dan turun lapangan. Serta pemerintah tidak semena – mena meletakkan tenaga pendamping dan pengawas yang kurang mengerti dengan suku ataupun kultur dari masyarakat tersebut. Sehingga dengan mempunyai jembatan akses antara pemerintah pusat bias mengetahui apa yang terjadi lapangan, sehingga meminimalisirkan

penyimpangan masyarakat (Patologi masyarakat) yang salah memanfaatkan bantuan.

Agar masyarakat ini berlanjut dan mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) penulis menyarankan agar masyarakat jangan dicabut dari bantuannya tetapi mensosialisasikan dan memberi tenaga pendamping serta pengawas yang mengerti kultur mereka. Serta pemerintah harus bekerja sama dengan pemangku masyarakat yang mengetahui pola pikir masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi dan Uhbiyati. 2007. *Ilmu pendidikan*. Jakarta Rineka Cipta.

Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.

Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Emmy widayanti.Dkk. 2013.*Pedoman operasional PKH bagi pemberi pelayanan kesehatan*. Jakarta : Direktorat jaminan sosial kementerian sosial RI.

Harfa, F. 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Program Kebijakan Publik*. Lampung: Universitas lampung.

- Husein Umar. 2002. *Evaluasi kebijakan pemerintah*. Jakarta. Gramedia. Puataka Utama.
- Kartasamita, Ginandjar, 2006, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, Pustaka Cakra.
- Nugrohi, Riant D, 2004/2008, *Kebijakan publik, formulasi, implementasi, dan evaluasi*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2006 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, edi, 2005. *Analisis kebijakan publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung. Alfabeta.
- Wirawan, 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang – Undang**
- Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
- Undang-undang No 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial.
- Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 02/HUK/2008

tentang “ Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008” .

Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan”; Malang: Universitas Brawijaya.

SKRIPSI

Fadhilahdhha, Muhamad ; 2014 ; ‘ Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat Mengenai Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin). Tanjungpinang.

Maslaini, ; 2014 ; ‘ Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MP). Kabupaten Bintan.

Zainul Arifin, Ahmad ; 2016 ; ‘ Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintan Berkapur. Kabupaten Bintan.

JURNAL

Lisfa, Indri Astuti, Hermawan; 2015; ”Pemberdayaan Masyarakat

Ratih Aggreani, Irawati; 2014; “Evaluasi Kebijakan Publik Terhadap Proses Pengadaan Anggaran Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang”; Malang; Universitas Brawijaya.